

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH PADABIDANG PENDIDIKAN DAN BIDANG KESEHATAN TERHADAP KEMISKINAN DI WILAYAH AJATAPPARENG

*The Influence Of Government Expenditure In The Sector Of Education And Health On
The Poverty In The Region Of Ajatappareng
(Study In Five Different Cities And Regencies In South Sulawesi)*

MUHAMMAD HATTA

Email : Muhammadhatta@umpar.ac.id

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare
Jl. Jend. Ahmad Yani, Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, 91131

ABSTRACT

Fiscal decentralization enters into poverty alleviation strategy in a number of ways. The study aims to determine the effect of the government expenditure in the sector of education, health, and the dependency level (control variable) directly and indirectly through the quality of human resources and economic growth on the poverty. The study was carried out in the region of Ajatappareng with analysis unit in 5 cities and regencies in South Sulawesi. The data were collected thorough literature review in the form of secondary of the city and regency government expenditure in education, health, and dependency rate between 2007 and 2011 as well as the quality of human resources, economic growth and poverty from 2008-2012. The data were analysed descriptively in quantitative measure. The study indicates that based on functional relationship the quality of human resources has a larger influence than the economic growth on the decrease of poverty. From the view of government expenditure in the educational and health sectors as well as the dependency level, the government larger expenditure in the sector of health provides more influence on the improvement of the quality of human resources, economic growth, and reduces poverty as compared to expenditure in the sector of education the level of dependency. Both variables only have influence on the quality of human resources. The study is an academic study and limited only to the analysis of the impact of the expenditure in the sector of health and education, the level of dependency on the poverty through the quality of human resources, and economic growth.

Keywords : *government expenditure, education, health, dependency level, poverty.*

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan daerah dengan kualitas manusianya yang tinggi, dimana kita memasuki era desentralisasi maka, pemerintah daerah mempunyai otoritas dalam menentukan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), untuk membiayai pembangunan di sektor-sektor yang merupakan determinan utama dalam pertumbuhan ekonomi tersebut. Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal didasarkan pada pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya, sehingga pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Sharp, dalam Kuncoro (2006), penyebab kemiskinan dipandang dari segi ekonomi adalah akibat dari rendahnya kualitas sumber daya manusia. Bagaimana masalah tersebut diatas bisa dipecahkan seluruhnya, itu sangat tergantung pada perencanaan pembangunan ekonomi daerah untuk melihat potensi pengembangan daerah dan SDM melalui suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan banyak lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi di daerah tersebut (Lincoln , 1999 ; Blakely E ,J, 1989).

Menurut teori pertumbuhan *Endogeneous*, Romer dalam Ginanjar (2012), meningkatnya stok pengetahuan dan ide baru dalam perekonomian yang mendorong tumbuhnya daya cipta dan inisiatif yang biasanya diwujudkan dalam bentuk kegiatan inovatif dan produktif. Kerangka teori ini dibangun dengan premis pokok, antara lain kondisi pasar tidak sempurna, adanya eksternalitas dalam perekonomian, dan teknologi atau penemuan-penemuan baru dimana akan mengakibatkan eksternalitas bagi perekonomian). Menurut Backer, dan Schultz, dalam Sumarsono (2003), modal manusia memiliki hubungan langsung dengan peningkatan produktivitas pekerja yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah, dalam ekonomi makro khususnya dalam pembangunan ekonomi, yang secara teoritis dikatakan sebagai masalah ketimpangan distribusi pendapatan, disamping itu kemiskinan juga disebabkan oleh banyak faktor yang sifatnya multidimensi bukan hanya faktor ekonomi tetapi juga faktor non ekonomi diantaranya faktor sosial seperti masalah kependudukan yang meliputi pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dan masalah pendidikan dan kesehatan, seperti pertumbuhan jumlah penduduk yang terjadi di Wilayah Ajatappareng dari tahun 2008–2012 adalah 6.13 persen. Namun perkembangan jumlah penduduk miskin di wilayah ini, jika dibandingkan dengan relatif membaiknya perekonomian dan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat ternyata tidak diikuti dengan kecepatan penurunan persentase penduduk miskin. Rata-rata pertumbuhan ekonomi dari tahun 2008-2012 adalah 7,27 persen. Teori *public finance* Musgrave dalam Adi Widodo (2011) mengungkapkan bahwa tidak seluruhnya semua masalah ekonomi diselesaikan oleh mekanisme pasar seperti halnya dengan *social goods*. *Kuznets Hypothesis*; ada keterkaitan antara pertumbuhan dan ketimpangan dimana pada tahap awal proses pembangunan tingkat pembangunan cenderung meningkat dan butuh waktu beberapa tahun untuk menjadi berkurang di negara-negara berkembang.

Beberapa studi empiris yang berkaitan dengan analisa pengaruh pengeluaran pemerintah, kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, dan penurunan kemiskinan, Kuznets (1955), Dollar dan Kraay (2001), Widodo, dkk, (2011), Agussalim (2007), Siregar (2007), Balisacan *et al.* (2002), Mackenzie (1991), Barro (1990), Kiraay, (2004), Fang, *et al.* (2002), Laabas dan Liman (2004).

Ada fakta menyatakan bahwa dampak ganda dari kebijakan publik, yaitu mendorong pertumbuhan disatu sisi dan memperbaiki ketimpangan dan menurunkan kemiskinan di sisi lain. Namun disadari bahwa kebijakan pro poor, seperti kebijakan belanja publik untuk pendidikan dan kesehatan cenderung pengaruhnya kecil dan dampaknya tidak signifikan terhadap pendapatan kaum miskin belanja publik dinegara-negara berkembang seringkali justru hanya memberi mamfaat bagi kelompok menengah dan kaya dari pada kelompok miskin.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Rancangan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Wilayah Ajatappareng meliputi lima kabupaten kota di Sulawesi Selatan pada Januari 2013 dengan pendekatan kuantitatif. Penentuan lokasi penelitian dilakukan dengan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa Wilayah Ajatappareng merupakan lima kabupaten kota di Sulawesi Selatan yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di Sulawesi Selatan namun angka kemiskinan juga tinggi. Pembahasan dalam penelitian ini dibatasi pada menganalisa pengaruh langsung pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan bidang kesehatan serta tingkat ketergantungan terhadap kemiskinan dan pengaruh tidak langsung pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan dan bidang kesehatan serta tingkat ketergantungan melalui kualitas/mutu sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan. Hal ini dilakukan untuk melihat seberapa besar keterkaitan pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan dan bidang kesehatan, tingkat ketergantungan, kualitas/mutu SDM dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 1. Diduga pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi.

2. Diduga pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi. 3. Diduga tingkat ketergantungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kualitas sumberdaya manusia dan pertumbuhan ekonomi.

Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder yang diperoleh dari berbagai lembaga dan instansi terkait :

1. Data panel hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2007-2012 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) diantaranya adalah jumlah dan persentase penduduk miskin serta garis kemiskinan. 2. Data dari Publikasi BPS, diantaranya indikator sosial, ekonomi dan PDRB Kabupaten Kota Propinsi Sulawesi Selatan, Data Informasi Kemiskinan, serta data BPKD terkait realisasi pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan berdasarkan urusan dalam APBD di lima Kabupaten kota di wilayah Ajatappareng (Buku Tentang Perda Pertanggung jawaban APBD Kabupaten/ Kota tahun 2007-2012), dan berbagai tulisan lainnya yang di publikasikan terkait dengan penelitian ini.

Metode Analisis

1. Analisis *Deskriptif* Digunakan untuk mencapai tujuan pertama yaitu menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan bidang kesehatan serta tingkat ketergantungan dalam bentuk tabel dan model tabulasi lainnya dan membandingkan secara diskriptif besaran dan fluktuasi anggaran pendidikan.pemerintah terhadap PDRB dan total APBD di masing-masing kabupaten kota di Wilayah Ajatappareng.
2. Analisis *Kuantitatif* Teknik Analisis kuantitatif berupa analisis regresi berganda (*Multiple Regresion*) dengan menggunakan data panel.

Analisa Model Struktural

Model analisa yang digunakan adalah SEM, model ini mengajukan pertanyaan penelitian sebagai masalah spesifikasi yang menghilangkan dampak waktu serta variasi antar silang-tempat dimodelkan secara eksplisit dalam suatu himpunan persamaan struktural. (Kuncoro, 2010).

Berdasarkan model struktural pada kerangka pikir maka dapat dibentuk persamaan matematis dalam model simultan SEM (*Structural Equation Model*) sebagai berikut :

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dengan mengacu pada model struktural yang ada dan berdasarkan hasil analisis yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dilihat signifikansi dan besaran pengaruh masing-masing variabel bebas, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, termasuk angka tingkat ketergantungan apakah bentuk pengaruhnya sesuai dengan teori (hipotesis) atau tidak. Pada penelitian ini digunakan tingkat signifikansi bervariasi, yakni probabilitas (p) 1%, probabilitas 5% dan probabilitas 10%.

Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Terhadap Kemiskinan

Dari hasil analisis menunjukkan bahwa pengaruh langsung dari besarnya pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan -0.069479 dengan tingkat signifikansi 5% (hpotesis diterima). Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan adalah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, artinya jika variabel pengeluaran bidang pemerintah naik sebesar satu persen maka jumlah kemiskinan akan turun sebesar 0.06%.

Peningkatan pengeluaran pendidikan diharapkan bisa meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Meningkatnya pendidikan akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja, yang pada gilirannya merupakan motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi (*engine of growth*) (Nafzinger,1997). Saat ini pemerintah

meyediakan anggaran minimal 20 persen dari APBN untuk bidang pendidikan. Kebijakan ini tercantum dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD. Hal ini tak lain bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka menghadapi tantangan kedepan dalam persaingan global. Sebab kemajuan suatu bangsa dapat diukur dari tingkat pendidikan masyarakatnya. Kebijakan fiskal (*fiscal policy*) merupakan salah satu kebijakan dalam makro ekonomi yang secara khusus berkaitan erat dengan kebijakan penerimaan dan pengeluaran negara. Salah satu instrumen kebijakan fiskal didalam penelitian ini adalah variabel pengeluaran pemerintah (bidang pendidikan) yang diharapkan dapat menjadi suatu stimulus bagi kegiatan perekonomian dan dapat bekerja menurunkan angka kemiskinan.

Schiller (2004) dalam Bellinger (2007), menyebutkan tiga hal yang menjadi penyebab kemiskinan, yaitu: 1. Kurang motivasi atau keterampilan. 2. Hambatan sosial terhadap akses pada kesempatan (*society's barrier to opportunity*). 3. Efek negatif dari kebijakan pemerintah terhadap pendapatan dan partisipasi kerja. Di Wilayah Ajatappareng proporsi rata-rata penduduk menurut kelompok umur di bawah 15 tahun selama tahun 2012 adalah sebesar 31,54%, penduduk usia 15-64 tahun sebesar 62,27% dan penduduk usia lanjut (kelompok umur di atas 65 tahun) sebesar 6,15% dari total penduduk. Pertumbuhan penduduk usia muda (0-14 tahun) selama tahun 2008-2012 rata-rata sebesar 4.54%, penduduk usia produktif sebesar 2.07% dan penduduk usia tua 0.35%. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia non produktif semakin meningkat proporsinya maupun pertumbuhannya dari tahun ke tahun seiring dengan pertumbuhan penduduk usia tua yang semakin menurun. Sementara itu angka melek huruf menurut kabupaten/kota periode, 2008-2012 di wilayah ini paling tinggi, dan daerah dengan angka melek huruf relatif tertinggi adalah Kota Parepare, Enrekang, Pinrang, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Barru dan Kabupaten Sidrap, demikian pula rata-rata lama sekolah tahun 2008 (7,9) dan tahun 2012 adalah (8,3), namun demikian angka tersebut diwilayah ini masih berada diatas rata-rata propinsi dan nasional. Meskipun indikator keberhasilan tersebut dapat tercapai harus tidak diringi dengan kecepatan penurunan angka kemiskinan rata-rata tingkat kemiskinan di wilayah ini dalam periode 2008-2012 adalah 10,8 persen masih jauh diatas angka kemiskinan propinsi.

Dari analisis pengaruh tidak langsung (*indirect effect*), maka dapat dijelaskan bahwa total pengaruh tidak langsung dari pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap kemiskinan adalah melalui kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi adalah -0.01877 dan signifikan. pada level pertama yaitu hanya melalui kualitas sumber daya manusia, hal ini disebabkan karena pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan jauh lebih dominan pengaruhnya terhadap kualitas sumber daya manusia jika dibandingkan terhadap pertumbuhan ekonomi hal ini dapat dilihat pada level pertama dari hasil estimasi dimana pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara langsung hasilnya tidak signifikan. Namun jika dilihat pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan pada tingkat level kedua secara bersama-sama melalui kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan hasil estimasi menunjukkan signifikan. Dengan demikian total pengaruh tidak langsung pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap kemiskinan adalah sebesar -0.01877 dan signifikan artinya jika pengeluaran pemerintah bidang pendidikan naik satu persen akan menyebabkan tingkat kemiskinan naik 0.0187%.

Total pengaruh tidak langsung pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap kemiskinan adalah -0,01877 dan signifikan melalui kualitas SDM artinya bahwa jika pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dinaikan satu persen maka tingkat kemiskinan akan turun 0,01%. Walaupun pengeluaran pemerintah bidang pendidikan yang berasal dari APBD masih relatif lebih sedikit namun tetap mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia, hal ini berkaitan dengan kemampuan pemerintah mempersiapkan sumber daya manusia yang lebih baik yaitu pada strata SD, SMP, dan SLTA, sebelum mereka melangkah kejenjang pendidikan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dukungan sumber dana dari pemerintah terutama untuk kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia

seperti pembangunan dibidang pendidikan yang lebih baik, pada tingkat pendidikan dasar dan menengah diupayakan untuk ditingkatkan dari tahun ke tahun dan sambil berupaya mengurangi kendala-kendala yang mungkin menjadi penghambat dalam realisasi anggaran belanja pemerintah untuk tahun berjalan.

Berdasarkan data dari lima kabupaten kota di Wilayah Ajatappareng memberi petunjuk bahwa sebagian besar dari total angkatan kerja di wilayah ini adalah tamatan SD yaitu 30 persen dari angkatan kerja dan 66% adalah tamatan SMP. Diketahui bahwa pada tahap pendidikan ini sebagian besar biaya pendidikan ditanggung oleh pemerintah dalam bentuk subsidi, sisanya adalah mereka yang tamat SLTA dan perguruan tinggi dimana besarnya biaya pendidikan belum masuk dalam perencanaan pemerintah untuk digratiskan. Disamping itu bila dilihat dari kontribusi sektor yang memacu pertumbuhan ekonomi wilayah maka sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah ini adalah sektor pertanian (40%) disusul oleh sektor jasa (20%) sektor perdagangan (14%). secara simultan pengaruh positif terhadap kemiskinan melalui kualitas SDM dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan lebih disebabkan karena banyaknya tamatan perguruan tinggi yang di serap oleh pasar tenaga kerja walaupun itu masih disektor jasa (pemerintahan). Pertumbuhan ekonomi yang sebagian besar ditunjang oleh sektor pertanian tidak mampu menyerap sebagian besar angkatan kerja tamatan perguruan tinggi dengan demikian SDM yang ada hanya sedikit yang berkontribusi untuk tenaga kerja sektor pertanian, namun modernisasi sektor pertanian cenderung lebih baik karena juga oleh tenaga kerja lulusan perguruan tinggi, kecuali Kota Parepare yang ditunjang oleh sektor jasa, industri dan perdagangan lebih dominan ditunjang oleh tenaga kerja lulusan perguruan tinggi.

Dalam teori endogenius dijelaskan sebagai suatu kerangka teoritis dalam menganalisis pertumbuhan ekonomi yang bersifat endogen, pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari dalam sistem ekonomi yang terdiri dari faktor-faktor produksi seperti modal tenaga kerja, investasi dan teknologi. Teori ini menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi lebih ditentukan oleh sistem produksi, bukan berasal dari luar sistem. Kemajuan teknologi merupakan hal yang endogen, pertumbuhan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan bidang kesehatan masuk dalam kebijakan fiskal dimana dapat difahami sebagai kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai cara seperti menaikkan dan menurunkan penerimaan dan pengeluaran negara dalam mencapai tujuan tertentu dan ruang lingkup kebijakan ini yaitu pada sektor pengeluaran pemerintah dan penerimaan pajak sehingga disebut juga sebagai kebijakan anggaran, yang merupakan bagian dari keputusan pelaku-pelaku ekonomi untuk berinvestasi dalam pengetahuan. Peran modal lebih besar dari sekedar bagian dari pendapatan apabila modal yang tumbuh bukan hanya modal fisik tapi juga menyangkut modal manusia (Romer, 1994).

Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan tidaklah berpengaruh secara langsung terhadap penurunan kemiskinan tetapi secara bersama-sama, pengaruhnya dapat dilihat melalui kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi. Hasil studi Agussalim (2007) kebijakan pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan melalui dampaknya terhadap pembentukan modal manusia (*human capital*). Kebijakan inilah yang dianggap sebagai kebijakan yang berdampak ganda (*win win policies*).

Total pengaruh merupakan akumulasi pengaruh langsung dan tidak langsung pengeluaran pemerintah bidang pendidikan. Total pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan melalui kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan bersama pengeluaran pemerintah bidang pendidikan secara langsung terhadap kemiskinan adalah -0.0882 dan signifikan dilihat dari satu level (kualitas SDM), hasil ini menunjukkan bahwa total pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap kemiskinan sesuai dengan yang dihipotesiskan yaitu memiliki pengaruh negatif.

Saat ini pengeluaran untuk bidang pendidikan terhadap PDRB masih rendah. Hal ini terlihat pula di Wilayah Ajatappareng, di mana pada tahun 2007 jumlah pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap PDRB kabupaten/kota di Wilayah Ajatappareng rata-rata hanya sebesar 6,85% selama lima tahun periode penelitian (2007-2011). Dengan demikian terlihat adanya kesenjangan antara keinginan untuk mengurangi

kemiskinan melalui peningkatan pembangunan manusia, sementara dari sisi alokasi anggaran untuk sektor publik (pendidikan) masih relatif rendah. Tahun 2007 rasio rata-rata kabupaten/kota 6,1% dan pada tahun 2011 naik menjadi 6,7%, jadi selama lima tahun periode penelitian ratio rata-rata persentase pengeluaran bidang pendidikan terhadap PDRB naik 0,6% namun demikian dapat dipahami bahwa proses pengalokasian anggaran haruslah berorientasi kepada kepentingan publik dimana keterbatasan anggaran menuntut pemerintah untuk mengutamakan skala prioritas. Untuk itu proses penyusunan anggaran selalu melibatkan banyak pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dengan berbagai permasalahan yang ada dari berbagai instansi, termasuk di bidang pendidikan.

Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Terhadap Kemiskinan

Dari hasil analisis menunjukkan bahwa pengaruh langsung dari besarnya pengeluaran pemerintah bidang kesehatan terhadap kemiskinan adalah berpengaruh negatif -0.491872 dan signifikan, sehingga hipotesis diterima. Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa pengeluaran pemerintah bidang kesehatan adalah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, artinya jika variabel pengeluaran pemerintah naik sebesar satu persen maka tingkat kemiskinan akan turun sebesar 0.4918%.

Salah satu yang menjadi kewajiban pemerintah adalah menyediakan barang publik. sebagaimana dalam teori *public finance* (Musgrave, 1989) mengungkapkan bahwa tidak seluruhnya dari semua masalah ekonomi diselesaikan oleh mekanisme pasar seperti halnya dengan *social goods*. Dimana *social goods* yang dimaksud disini terkait dengan adanya eksternalitas, distribusi pendapatan, dan masalah-masalah ekonomi lainnya, seperti pengangguran, kemiskinan dan sebagainya, dalam hal tersebut mekanisme pasar gagal menyelesaikannya (*market failure*). Mekanisme pasar pada hakekatnya adalah merupakan suatu wahana untuk mengekspresikan kebebasan individu untuk mencari keuntungan individual sendiri. Oleh karena itu aktivitas-aktivitas perekonomian yang bersifat kolektif, publik dan atau aktivitas yang tidak bermotif keuntungan tidak bisa diselenggarakan oleh pasar, fakta-fakta inilah yang menyebabkan pemerintah wajib melakukan intervensi terhadap pelayanan kesehatan dengan semakin memperbesar anggaran belanja untuk bidang kesehatan.

Angka harapan hidup yang paling rendah di wilayah ini namun relatif meningkat dari tahun ke tahun adalah Kabupaten Barru sehingga kedepannya diharapkan dapat sejajar dengan empat kabupaten lainnya. yang rata-rata diatas 72 tahun, dan melampaui angka harapan hidup ditingkat nasional (69 tahun) dan tingkat propinsi (70 tahun), sementara itu di wilayah ini pada tahun 2008, jumlah penduduk miskin 120 ribu jiwa. atau (11,33%) dan pada tahun 2012 menurun menjadi 96 ribu jiwa (8,6%), artinya dalam kurun waktu lima tahun telah terjadi penurunan penduduk miskin sebesar 24.000 jiwa di Wilayah Ajatappareng atau rata-rata 4.800 jiwa.pertahun.. Besarnya pagu anggaran yang ditetapkan pemerintah di bidang kesehatan telah diatur dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Pasal 171 tentang bagaimana meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan mengupayakan pengadaan dan pemafaatan fasilitas kesehatan, ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat, penambahan dan peningkatan kualitas petugas dan pemberian penyuluhan tentang kesehatan.

Total pengaruh tidak langsung pengeluaran pemerintah bidang kesehatan terhadap kemiskinan adalah -0.11047 dan signifikan pada dua level tingkatan, baik pada level tingkat pertama demikian pula pada level tingkat kedua, dengan demikian jika pengeluaran pemerintah bidang kesehatan meningkat satu persen maka kemiskinan akan turun sebesar 0,11%.

Rata-rata ratio pengeluaran pemerintah untuk bidang kesehatan di wilayah ini adalah 10,40% dari total realisasi anggaran belanja pemerintah dalam APBD. Dari tahun 2008-2011 pengeluaran pemerintah bidang kesehatan menunjukkan trend yang relatif stagnan artinya kenaikannya sangat kecil dan fluktuasinya relatif stagnan dilihat dari proporsi terhadap total realisasi pengeluaran pemerintah daerah bidang kesehatan yang relatif memberi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan IPM dalam dua skema, yaitu mengurangi pengeluaran secara langsung kepada masyarakat dengan adanya program kesehatan gratis dan adanya belanja modal yang

akan memberikan lapangan kerja berupa program-program yang bersifat padat karya, disamping itu semakin baiknya pelayanan kesehatan akan mendorong produktivitas tenaga kerja lebih meningkat karena ditunjang oleh kesehatan yang baik, namun demikian porsi belanja modal relatif lebih kecil dibanding dengan porsi belanja gaji pegawai.

Total pengaruh pengeluaran pemerintah bidang kesehatan terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun secara tidak langsung adalah sebesar (-0.60236) signifikan artinya total pengaruh pengeluaran pemerintah bidang kesehatan terhadap kemiskinan sesuai dengan dihipotesiskan yakni memiliki pengaruh negatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Wilayah Ajatappareng, pengeluaran bidang kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, artinya pelayanan pemerintah terhadap bidang kesehatan dinilai berhasil meningkatkan taraf hidup dan harapan hidup penduduknya. Kesehatan berpengaruh terhadap kemiskinan karena kesehatan merupakan syarat untuk meningkatkan produktivitas seseorang.

Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah ini cukup tinggi bahkan diatas rata-rata nasional yaitu 74,66 pada tahun 2012 Orang yang kondisi kesehatannya buruk, tidak akan mampu melakukan pekerjaan dengan efektif. Jika seseorang tidak efektif dalam bekerja, maka produktivitasnya juga rendah. Jika produktivitas seseorang rendah, berarti penghasilannya juga rendah. Penghasilan seseorang yang rendah akan membuat orang tersebut kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga orang tersebut bisa terjebak dalam kemiskinan.

Saat ini pengeluaran untuk bidang kesehatan terhadap PDRB masih rendah. Hal ini terlihat pula di wilayah Ajatappareng, dimana pada tahun 2007 persentase pengeluaran bidang kesehatan terhadap PDRB kabupaten/kota di wilayah Ajatappareng rata-rata hanya sebesar 2,1% selama lima tahun periode penelitian (2007-2011). Dengan demikian terlihat adanya kesenjangan antara keinginan untuk mengurangi kemiskinan melalui peningkatan pembangunan manusia, sementara dari sisi alokasi anggaran untuk sektor publik (kesehatan) masih relatif rendah, pada tahun 2007 ratio rata-rata kabupaten/kota 2,64% dan pada tahun 2011 turun menjadi 1,78%, jadi selama lima tahun periode penelitian ratio rata-rata persentase pengeluaran bidang kesehatan terhadap PDRB mengalami penurunan. namun demikian hal ini dapat difahami bahwa proses pengalokasian anggaran haruslah berorientasi kepada kepentingan publik dimana keterbatasan anggaran menuntut pemerintah untuk mendahulukan skala prioritas.

Tingkat Ketergantungan Terhadap Kemiskinan

Dari hasil analisis data menunjukkan bahwa pengaruh langsung dari tingkat ketergantungan terhadap kemiskinan di Wilayah Ajatappareng cenderung berpengaruh positif 0,072673 dengan tingkat signifikansi 5% artinya hipotesa diterima, hal ini menunjukkan bahwa jika tingkat ketergantungan meningkat satu persen maka akan diikuti oleh meningkatnya angka kemiskinan 0,0726%. Semakin tinggi tingkat ketergantungan menggambarkan semakin berat beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif karena harus mengeluarkan sebagian pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan penduduk usia non produktif sehingga pendapatan yang ada lebih banyak digunakan untuk konsumsi dari pada menabung dan mengakibatkan penurunan dalam pembentukan modal dan akan menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi, hal ini dapat dilihat estimasi pengaruh langsung angka ketergantungan terhadap pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan yang dapat mengganggu laju pertumbuhan ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi di wilayah ini cenderung melambat.

Menurut Solow, jika suatu negara / daerah menyisihkan sebagian besar pendapatannya kedalam tabungan dan investasi maka negara tersebut akan memiliki persediaan modal pada kondisi mapan dan tingkat pendapatan yang tinggi. Sedangkan jika suatu negara/daerah berupaya hanya menabung dan menginvestasikan sebagian kecil dari pendapatannya maka modal dalam kondisi kurang mapan dan pendapatannya akan rendah. Tingkat tabungan yang tinggi akan mengakibatkan tingkat investasi yang tinggi pula sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan oleh kenaikan pendapatan nasional (Mankiw, 2000). Terkait dengan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa tingginya tingkat ketergantungan di wilayah ini akan menyebabkan tingginya beban yang harus ditanggung oleh usia produktif sehingga tingkat tabungan

juga menjadi rendah oleh karena sebagian besar pendapatan harus dikeluarkan untuk konsumsi.

Dari analisis pengaruh tidak langsung (*indirect effect*), maka dapat dijelaskan bahwa total pengaruh tidak langsung dari tingkat ketergantungan terhadap kemiskinan melalui kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.01239 dan signifikan pada level pertama (yaitu hanya melalui kualitas sumber daya manusia, hal ini disebabkan karena pengaruh tingkat ketergantungan jauh lebih dominan terhadap kualitas sumber daya manusia jika dibandingkan terhadap pertumbuhan ekonomi hal ini dapat dilihat pada level pertama dari hasil estimasi dimana pengaruh tingkat ketergantungan terhadap pertumbuhan ekonomi secara langsung hasilnya tidak signifikan. Namun jika dilihat hasil estimasi pengaruh tingkat ketergantungan pada level kedua secara bersama-sama melalui variabel kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan menunjukkan hasil yang signifikan. Dengan demikian total pengaruh tidak langsung tingkat ketergantungan terhadap kemiskinan adalah sebesar 0.01239 dan signifikan artinya jika tingkat ketergantungan naik satu persen menyebabkan tingkat kemiskinan naik 0.01%.

Data menunjukkan rata-rata lama sekolah di wilayah ini hanya 8,3 ini menunjukkan ada kekhawatiran bahwa penduduk di wilayah ini mungkin tidak akan mampu bersaing dalam era persaingan global karena sebagian besar penduduk hanya mempunyai tingkat pendidikan tamat SMP dan cenderung tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ketika dihadapkan pada landasan pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*) mungkin saja wilayah ini akan tersisih dari wilayah hinterlandnya yang lebih maju.

Total pengaruh merupakan akumulasi dari pengaruh langsung dan tidak langsung tingkat ketegantungan, terlihat bahwa total pengaruh tingkat ketergantungan melalui kualitas SDM, pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan adalah 0,085071 dan signifikan, yang menunjukkan bahwa total pengaruh tingkat ketergantungan sesuai dengan yang di hipotesiskan yaitu berpengaruh positif, artinya jika tingkat ketergantungan naik satu persen maka kemiskinan akan naik sebesar 0,08%.

Rata-rata pertumbuhan ekonomi 7,3% selama kurun waktu lima tahun dan struktur tingkat pendidikan yang dilihat dari data besarnya persentase penduduk yang menamatkan pendidikan di bangku SLTP 66% jauh lebih besar dibanding dengan tamatan SLTA atau perguruan tinggi 29%, sementara IPM rata-rata 7,64 lebih tinggi dari rata-rata nasional dan propinsi dan tingkat kemiskinan 10,89%, Melihat data tersebut kita berkesimpulan bahwa angka pertumbuhan ekonomi, IPM, cukup tinggi namun tingkat kemiskinan juga relatif tinggi disertai tingginya angka tingkat ketergantungan, kondisi seperti ini memberikan gambaran bahwa kontribusi pertumbuhan ekonomi terkesan masih rendah dalam mereduksi kemiskinan, disamping itu adanya target pemerintah dalam meningkatkan pembangunan manusia luput memperhitungkan keseimbangan struktur kependudukan sehingga berimplikasi pada meningkatnya angka tingkat ketergantungan.

Saat wilayah ini masih harus berhadapan dengan persoalan klasik pendidikan angkatan kerja yang sangat rendah, produktivits yang rendah, dan lapangan kerja yang minim serta angka pengangguran yang tinggi dan seterusnya, maka mustahil mamfaat bonus demografi dapat diharapkan dalam memacu pertumbuhan ekonomi.. Fakta ini terlihat dari dominannya angkatan kerja yang hanya lulusan SD 46,7% (2012), jika dibandingkan lulusan diploma dan sarjana yang jumlahnya kurang dari 10%, kenyataan ini mempengaruhi pemamfaatan sumber daya alam (meliputi pemeliharaan dan pemamfaatan) maupun penggunaan kapasitas produksi yang sudah terpasang secara efesien dan efektif merupakan masalah serius lainnya. Terkait dengan masalah ini penting pula diingat bahwa kemampuan penduduk dalam konteks ekonomi sangat ditentukan oleh tingkat produktivitas.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: Hasil studi menunjukkan bahwa alokasi pengeluaran pemerintah terhadap sektor publik tidak secara langsung mempengaruhi kemiskinan, namun secara bersama-sama (simultan) pengeluaran sektor publik dan dapat mempengaruhi kemiskinan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa kualitas SDM lebih dominan dari pada pertumbuhan ekonomi dilihat pengaruhnya terhadap penurunan kemiskinan. Hal tersebut berarti bahwa pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan bidang kesehatan tidak bisa berdiri sendiri sebagai variabel independen dalam mempengaruhi kemiskinan, namun harus berinteraksi dengan variabel lain (kualitas SDM dan pertumbuhan ekonomi), Bidang kesehatan berpengaruh secara langsung terhadap kualitas SDM dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan bidang pendidikan dan tingkat ketegantungan hanya berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dalam menurunkan kemiskinan. Sehingga implikasi dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan akan dapat mempengaruhi penurunan kemiskinan jika pengeluaran tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi. Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan serta tingkat ketergantungan melalui kualitas SDM terhadap kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan dengan demikian pola hubungan yang terjadi antara pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, bidang kesehatan dan tingkat ketergantungan melalui kualitas SDM akan menurunkan kemiskinan 0.0029%, hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan dari total angkatan kerja lulusan SD lebih besar (30%), SLTA (66%) mereka rata-rata mendominasi tenaga kerja disektor pertanian yang dominan terhadap PDRB. Kesenjangan pendidikan akan menyulitkan tenaga kerja beralih dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pembangunan manusia yang tercermin dari nilai IPM akan berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan, sebagai variabel intervening. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi merupakan variabel yang dapat mempengaruhi variabel kemiskinan (sebagai variabel tujuan) jika berinteraksi dengan variabel independen lainnya. Selain itu, variabel kualitas SDM juga merupakan variabel yang memediasi variabel independen lainnya dalam mempengaruhi variabel kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusalim. 2007. Peran Anggaran Pemerintah Terhadap Pengurangan Angka Kemiskinan di Indonesia. *Ekonomi dan Bisnis*. Vol.10 No1.
- Afzal et.al. 2012, Relationship among Education, Poverty and Ekonomi Economic Growth in Pakistan: An Econometric Analysis, *Journal of Elementary Education* Vol.22, No.1 pp.23-45.
- Agussalim. (2011). Desain Strategis Untuk Mengakselerasi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Selatan, Makalah Presentase pada Simposium Pembangunan Kawasan Timur Indonesia (31 Oktober 2011).
- Balisacan, A, EM, Pernia, dan A. Asra. 2003. Revisiting Growth and Poverty in Indonesia : What do Sub. nasional Data Show? *Bulletin Of Indonesian Economic Studies* Volume 39, Issue 3 Desember 2003,
- Barro, Robert. 2000. Inequality and Growth in a Panel of Countries *Journal of Economic Growth*, 5: 5–32 (March 2000). Kluwer Academic Publishers.

- Bellinger, W. K.. 2007. *The Economics Analysis of Public Policy*. Routledge: Oxon.
- Blakely, E. J. 1989. *Planning Local Economic Development: Theory and Practice* California: SAGE Publication, Inc
- Becker, G.S.1984. *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Conference to Education*. Chicago: The University of Chicago Press
- Dollar, David, and Aart Kraay. 2001. *Trade, Growth, and Poverty Policy Research Working paper# 2615* .World Bank Retrieved January9, 2005 from: <http://are.berkeley.edu/~harrison/globalpoverty/>
- Deninger, Klaus and Lyn Squire. 1996. *A New Data Set Measuring Income Inequality*. *World Bank Economic Review*10(3):565-91. Retrieve February 9,2005 From: <http://web.worldbank.org/website/external/topics/extrovert/extpgi/>
- Fan, S, L, Zhang, and N, Rao. 2002. *Growth, Inequality, and Poverty in Rural China: The Role Of Public Investments*.IFPRI Research Report 25. Washington D.C. Retrieved February9, 2005 from: <http://web.worldbank.org/wbsite/external/topics/extrovert/extpgi/>
- Kraay, Aart. 2004. *When Is Growth Pro Poor Evidence From a Panel of Countries*. *Policy Research Working Paper #3225*. World Bank. December. Retrieve february 10.2005 from: <http://web.worldbank.org/external/topicks/extrovert/extpgi/>,
- Kuznes, Simon. 1955. *Economic Growth and Income Inequality*, *American Economic Review*
- Laabas, Belkacem and Imed Liman. 2004. *Impact Of Public Policy on Poverty, Income Distribution and Growth*. Arab Planning Institute.
- Kuncoro, Mudrajat. (2006). *Ekonomika Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan*. UPP STM YKPN, Yogyakarta.
- Mankiw, N. Gregory. 2006. *Makro Ekonomi*. Ed.6, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Musgrave, Richard.A dan Musgrave, Betty,B. (1991). *Keuangan Negara, Teori dan Praktek*. Jakarta, Penerbit Erlangga
- Perkins, D. H; S. Radeler; D. R. Snodgrass; M. Gillis, dan M. Roemer. 2001. *Economics of Development*. Fifth Edition. W.W. Norton & Company Inc, New York
- Romer, P., 1990. "Endogenous Technological Change". *Journal of Political Economy* 98:S71-S 102
- Siregar, Hermanto dan Dwi Wahyuniarti. (2008). *Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin*. <http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdffiles/PROS.2008.MAK3.pdf>.Diakses tanggal 25 Juni 2013.
- Todaro, Smith. 2006. *Economic Development*, Seventh Edition, New York, Addition Wesley Longman, Inc.